

SEBELUM SEKOLAH LAKSANAKAN PTM

## Sultan: Pastikan Semua Guru Sudah Divaksin

**YOGYA (KR)** - Uji coba pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah (SMA/SMK) di DIY berlangsung cukup baik. Hal itu bisa dilihat dari tidak adanya laporan penularan atau kluster baru selama uji coba PTM dilaksanakan.

Kendati demikian pada tahun ajaran baru mendaftarkan Penda DIY belum ada rencana untuk menerapkan PTM di semua sekolah. Pasalnya bagi sekolah yang mau melaksanakan PTM selain memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, semua gurunya harus dipastikan sudah mendapatkan vaksinasi.

Jadi harus dilaksanakan secara hati-hati," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Bangsal Kepatihan, Senin (24/5).  
Sultan mengungkapkan, sebelum sekolah memutuskan untuk melaksanakan PTM secara keseluruhan, pihaknya berencana mencoba PTM di SD maupun SMP. Langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa penerapan protokol kesehatan (Prokes) sudah dapat dijalankan dengan baik. Sehingga tidak terjadi kluster penularan di lingkungan sekolah. Jika suatu sekolah



KR-Riyana Ekawati  
**Sri Sultan HB X**

sudah siap menjalankan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat, Penda DIY baru akan memberikan kesempatan kepada sekolah untuk melaksanakan PTM.  
"Setelah dilakukan di jenjang SMA/SMK atau kejurusan uji coba itu dilakukan untuk SD dan SMP yang kewenangannya ada di kabupaten/kota. Apabila dipastikan bisa dilaksanakan dengan tidak ada kluster dan

semua gurunya sudah divaksin. Mungkin secara bertahap sekolah yang sudah siap akan dilakukan pembelajaran tatap muka. Tentunya semua itu dilakukan dengan Prokes yang ketat," ungkap Sultan.  
Menurut Sultan, penegakan Prokes harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk mengantisipasi terjadinya penularan. Termasuk seandainya PTM akan dilakukan harus dipastikan segala sesuatu bisa dilaksanakan dengan baik. Karena kondisi anak didik harus dijaga dengan sebaik-baiknya.  
"Penegakan Prokes harus benar-benar diperhatikan. Semua itu memang perlu, kasihan nanti kalau terjadi kluster, ini yang harus dihindari, jadi harus didesain dengan sebaik-baiknya," ujar Sultan. **(Ria)-d**

SELAMA PELARANGAN DAN PENGETATAN MUDI

## 2,5 Juta Kendaraan Masuk ke DIY

**YOGYA (KR)** - Kebijakan pemerintah terkait dengan kebijakan larangan mudik untuk menekan kasus Covid-19, mendapat respons positif dari masyarakat. Meski begitu pascakebijakan periode larangan mudik berakhir, kendaraan yang memasuki wilayah DIY justru mengalami peningkatan cukup tinggi.  
Hal itu diperkuat dengan data yang ada di Dinas Perhubungan (Dishub) DIY dari 6 - 21 Mei 2021 atau sepanjang larangan mudik, tercatat ada 2.529.002 kendaraan yang masuk ke DIY. Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan data pemudik yang keluar DIY, yakni sebanyak 1.709.505 kendaraan.  
"Kendaraan yang masuk wilayah DIY justru meningkat pasca-periode pelarangan mudik berakhir. Buktinya tercatat ada 2.529.002 kendaraan yang masuk ke DIY, jumlah tersebut tergolong cukup banyak.  
Sebaliknya, jumlah kendaraan yang masuk DIY menurun signifikan selama 6 - 17 Mei, yaitu sekitar 75 ribu sampai 88 ribu kendaraan tiap harinya. Setelahnya, (setelah 17 Mei) arus kendaraan berangsur-angsur meningkat hingga mencapai 130 ribu kendaraan perhari," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, Ni Made Wipanti Indrayanti di Bangsal Kepatihan, Senin (24/5).  
Made menyatakan, pasca kebijakan larangan mudik berakhir, pemerintah menetapkan masa pengetatan perjalanan yang berakhir, Senin (24/5). Guna meng-

antisipasi adanya penambahan kasus baru, sepanjang periode pengetatan Penda DIY tetap melakukan pemeriksaan kepada para pelaku perjalanan yang melintas di wilayah perbatasan. Namun karena jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah pelaku perjalanan yang melintas, pemeriksaan dilakukan secara acak. Mengingat untuk saat ini sifatnya lebih pada pengendalian.  
"Berbeda dengan selama kebijakan larangan mudik diterapkan yaitu pada 6 - 17 Mei. Saat ini pemeriksaan kami lakukan secara acak, karena sifatnya lebih pada pengendalian bukan lagi penyekatan. Walaupun begitu, kami berharap bisa meminimalisir penularan kasus. Karena seandainya ditemukan adanya kasus baru bisa langsung ditangani," terangnya.  
Lebih lanjut Made menambahkan, mengingat pada 26 Mei besok ada Hari Raya Waisak yang merupakan hari libur nasional, diprediksikan sepanjang masa pengetatan arus kendaraan akan mengalami peningkatan. Pasalnya ada kemungkinan masyarakat akan memanfaatkan momentum libur nasional itu untuk bepergian. Guna mengantisipasi terjadinya hal-hal tidak diinginkan mengimbau masyarakat untuk menegakkan Prokes dan memeriksakan diri sebelum melakukan perjalanan agar terhindar dari Covid-19. Semua itu perlu dilakukan karena selama libur Waisak ada kemungkinan mobilitas masyarakat meningkat. **(Ria)-d**

## Posko PPKM Mikro Tetap Awasi Mobilitas Warga

**YOGYA (KR)** - Berakhirnya libur Lebaran pada pekan lalu tidak akan mengurangi kegiatan pengawasan di wilayah. Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di tingkat RT atau RW tetap diminta mengawasi mobilitas warga di wilayahnya.  
Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, menjelaskan pengawasan tersebut meliputi tiga tahap yakni memantau, mencatat dan melaporkan warga dari luar daerah yang datang.  
"Usai libur Lebaran ini seluruh posko PPKM mikro tetap kami minta untuk memantau mobilitas warga di wilayah masing-masing. Jika ada pendatang pun wajib dilaporkan," jelasnya, Minggu (23/5).  
Menurutnya, pemantauan di wilayah merupakan langkah paling awal untuk mencegah dan mengantisipasi penularan Covid-19 di Kota Yogyakarta. Sehingga posko PPKM mikro memegang peran yang sangat penting dalam upaya menjaga agar kasus penularan tidak berkembang luas. Dimungkinkan ada beberapa warga yang memilih mudik usai libur Lebaran, apalagi dalam minggu ini terdapat hari libur nasional. Oleh karena itu pengawasan harus tetap dilakukan guna menjamin setiap warga yang datang tidak menjadi pembawa virus.  
Selain dilakukan pengawasan melalui PPKM mikro di RT dan RW, pengetatan protokol kesehatan juga diberlakukan di lingkungan perkantoran. Khususnya di lingkungan Pemkot Yogyakarta yaitu selektif memilih rombongan tamu yang akan berkunjung. "Khususnya tamu dari daerah yang masuk zona merah. Lebih baik ditunda dulu. Di internal perkantoran juga wajib menjalankan protokol karena selama libur kemarin, saling berinteraksi dengan banyak orang," imbuhnya.  
Heroe menjelaskan sampai sejauh ini perkembangan kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta dinilai cukup terkendali. Meskipun demikian pihaknya tetap akan melakukan pemantauan selama satu hingga dua pekan usai libur lebaran untuk memastikan apakah terjadi kenaikan kasus atau tidak. Salah satu kasus penularan yang menyita perhatian adalah kluster di Kelurahan Wirobrajan. Akan tetapi testing dan tracing dari kasus itu sudah selesai. **(Dhi)-d**

## MAHASISWA PRODI MATEMATIKA UAD Beri Pendampingan KBM - Baciro



KR - Istimewa  
**Dosen dan mahasiswa Prodi Matematika UAD di Baciro.**

**YOGYA (KR)** - Mahasiswa dan dosen Prodi Matematika Fakultas Sains Teknologi Terapan (FAST) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) bersama Pengurus Pengok Kidul RW 7 Baciro, Kemantren Gondokusuman, Yogyakarta melaksanakan kerja sama.  
Mengawali program tersebut dilakukan Pembukaan Kerja Sama antara Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) Taman Widya di Taman Casper RW 7 Baciro dengan Prodi Matematika UAD di Pengok Kidul RW 7 Baciro, Kemantren Gondokusuman, Senin (24/5) sore. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa pendampingan pembelajaran Matematika akan berlangsung hingga Oktober mendatang.  
Dr Yudi Ari Adi Msi selaku Penanggungjawab Pengabdian Masyarakat mengatakan, kegiatan pendampingan di KBM Taman Widya akan berlangsung sampai Oktober mendatang. "Kenapa kami memilih di sini? KBM Taman Widya sebagai percontohan di Kota Yogyakarta," ucapnya.  
Sedangkan Sugiyarto PhD dan Zani Anjani Rafsanjani HSM MSc selaku anggota Pengabdian Kepada Masyarakat UAD menjelaskan, bentuk pendampingan Bimbingan Belajar diperuntukkan sekitar 40 siswa SD kelas 1 - 6, SMP, SMA/SMK mata pelajaran Matematika. Ditambahkan Sugiyarto, selain pendampingan Matematika, dilakukan pula pelatihan untuk relawan yang mengajar di KBM Taman Widya untuk 3-4 orang. **(Jay)-d**

KEBIJAKAN BERUBAH-UBAH

## Terobosan PHRI Tidak Berjalan

**YOGYA (KR)** - Hotel dan Restoran di Yogya terus mengalami keterpurukan, terobosan apapun yang dilakukan selama pandemi Covid-19 sering tidak berjalan dengan baik. Sebab, kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendadak dan berubah-ubah membuat hotel dan restoran tidak bisa bergerak.  
"Bisnis hotel dan restoran bisa hidup berdasarkan pergerakan manusia atau mobilitas manusia. Penyekeatan-penyekatan yang berubah-ubah kriterianya dan lain-lain membuat orang mau bepergian bingung dan akhirnya memutuskan untuk menunda," tutur Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Dedy Pranowo Eryono kepada KR, Minggu (23/5).  
Dedy menyatakan, seharusnya kebijakan tersebut bisa konsisten bila ada penyekeatan dan berdampak. Hotel dan restoran bisa

diberikan solusi untuk bisa membayar PLN, BPJS, dan lain-lain. "Kerugian kita belum bisa memastikan yang jelas rata-rata okupansi hanya 5-7 persen saja selama libur Lebaran kemarin," ungkap Dedy.  
Padahal biasanya selama libur Lebaran, hotel dan restoran selalu *full booked*. "Justru saat ini setelah libur Lebaran atau setelah 17 Mei 2021 baru ada kenaikan

okupansi jadi 10 s/d 25 persen," ujarnya.  
Saat ini terobosan yang coba dilakukan PHRI untuk mendongkrak okupansi masih dengan program *promo stay at Jogja*, paket sepeda wisata. "Juga beberapa hotel untuk karantina 5 hari PMA dan pemudik yang belum diterima di desa/kampungnya, kemudian ada paket syawalan dan lainnya," ucap Dedy. **(Vin)-d**

**RELAS PANGILAN KEPADA TERGUGAT**  
Nomor : 43 / Pdt.G / 2021 / PN. Pwt  
Atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam perkara perdata Nomor : 43/Pdt.G/2021/PN.Pwt-, dengan ini kami Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto telah memanggil kepada :  
**SUNSIWATI** Alias **SUMIWATI**, semula beralamat di Jalan Penatusan, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai :  
**TERGUGAT** ;  
Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Purwokerto, Jl. Gerilya No. 241 - Purwokerto, pada :  
===== **HARI : RABU , TANGGAL : 02 JUNI 2021, JAM : 10.00 WIB** , =====  
sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang, dalam perkara perdata Nomor : 43/Pdt.G/2021/PN.Pwt-, antara :  
**BABY LIANAWATI** alias **BEBY LIANAWATI** ; ----- sebagai **PENGUGAT** ;  
Melawan :  
**SUNSIWATI** Alias **SUMIWATI** ; ----- sebagai **PARA TERGUGAT** ;  
Oleh karena Pihak Tergugat tersebut di atas tidak diketahui tempat tinggalnya atau domisilinya dengan jelas, akan tetapi masih dalam Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, panggilan ini dilaksanakan melalui Pengumuman Surat Kabar Harian setempat (Sik. Kedaulatan Rakyat ) supaya diketahui oleh orang banyak / Umum ;  
Purwokerto, Mei 2021  
Jurisita,  
Pengadilan Negeri Purwokerto  
( A. UNTUNG SUBAGYA )  
NIP. 196312071984021001

## Seleksi Lawatan Sejarah 2021 Dinamika Budaya di Jawa Abad XX

**YOGYA (KR)** - Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) DIY bekerja sama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) DIY dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY, menyelenggarakan seleksi lawatan sejarah bertajuk 'Dinamika Budaya di Jawa Abad XX' bagi siswa/siswi setingkat SMA/SMK/MA sederajat, 23 - 25 Mei 2021.



KR - Wulan Yanuarwati  
**Pit Kepala Dinas Kebudayaan DIY berfoto bersama perwakilan kontingen Kabupaten/Kota.**

Lawatan sejarah juga akan mengangkat dinamika yang terjadi di Yogyakarta, yang mana Kraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman sebagai pusat pemerintahan mengalami dinamika politik, ekonomi, dan sosial budaya. Puluhan siswa dari 5 kabupaten/kota di DIY mengikuti seleksi dan 18 kandidat terbaik akan dipilih untuk kemudian mewakili DIY dalam lawatan sejarah daerah regional DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang akan diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Juni mendatang.  
Pit Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Aris Eko Nugroho mengatakan, selain memilih siswa/siswi terbaik untuk mewakili Yogyakarta, acara juga sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kesejarahan bagi siswa. "Melalui pembelajaran sejarah, kita menegalkan, menumbuhkan pemahaman, serta mendidik generasi muda terkait jati diri bangsa Indonesia dengan harapan dapat menjaga rasa cinta tanah air dan berkembang menjadi bangsa yang lebih baik," ujarnya pada pembukaan lawatan sejarah, Minggu (23/5) di Hotel Santika Yogyakarta.

Melalui sejarah, dikatakan Aris juga dapat untuk mempelajari dinamika kehidupan masyarakat sehingga dapat membentuk jati diri masyarakat terutama generasi muda. "Pembelajaran tentang kehidupan masa lalu di mana kita dapat mendapatkan pemahaman yang luas dan pembelajaran kesalahan masa lalu yang dapat dijadikan bekal kehidupan di masa datang," jelasnya.  
Aris berharap melalui kegiatan ini, siswa/siswi dapat belajar sejarah dengan luas dan kritis. Sebab menurutnya belajar sejarah tidak hanya berfokus dengan menghafalkan nama pahlawan dan tanggal peristiwa sejarah. "Kami berharap dapat menjadi bekal generasi muda untuk membangun bangsa yang lebih baik di masa datang," imbuhnya.  
Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa Sastra, dan Permusium Dinas Kebudayaan DIY, Rully Andriadi mengatakan lawatan sejarah selain pembelajaran di kelas, juga ada outing di lapangan dan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 se-

cara ketat.  
"Kegiatan ini pembelajaran di kelas, ada diskusi, presentasi, dan kunjungan lapangan ke lokasi. Kita laksanakan proses seleksi dengan baik dan tetap mematuhi protokol kesehatan," jelasnya.  
Adapun lokasi kunjungan yang dipilih ialah Buk Renteng atau yang lebih dikenal sebagai kanal Van der Wijk dan Pabrik Gula Sewu Galur yang merupakan salah satu pabrik gula terbesar yang hingga kini masih dapat dilihat sisa-sisa peninggalannya.  
"Kehadiran 2 ikon tersebut dipilih karena mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat Yogyakarta termasuk dinamika yang mengingat Yogyakarta sebagai kota besar di Jawa pada saat itu," jelasnya. Adapun narasumber yang dihadirkan pada lawatan sejarah kali ini berasal dari Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) DIY, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta, dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY. **(R-1)-d**

**DPRD KOTA YOGYAKARTA**  
**SUARA WAKIL RAKYAT**  
Jl. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

## UJUNG TOMBAK PENEGAKAN PROKES DI WILAYAH Posko PPKM Mikro Perlu Dukungan

**YOGYA (KR)** - Penegakan protokol kesehatan (prokes) harus tetap menjadi perhatian serius demi melindungi masyarakat dari ancaman penularan Covid-19. Meski penegakan tersebut menjadi kewenangan Sat Pol PP Kota Yogya, namun peran posko Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro cukup strategis.  
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Yogyakarta Indaruwanto Eko Cahyono, menyebut saat ini terdapat 2.535 Posko PPKM mikro yang tersebar di seluruh wilayah Kota Yogya. "Ada yang berbasis RT maupun RW. Posko PPKM mikro justru menjadi ujung tombak karena berhadapan dengan masyarakat di wilayah," jelasnya.  
Selama libur lebaran lalu, ketugasan di Posko PPKM mikro tergolong cukup berat. Selain harus mengawasi warga yang datang dari luar kota, berbagai kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan juga tak luput dari pengawasan. Dalam berbagai kesempatan mereka bahkan dituntut menjadi corong edukasi dan sosialisasi terkait disiplin penerapan protokol kesehatan.  
Seiring perannya yang cukup signifikan, anggota Komisi A ini berharap adanya dukungan dari pemerin-

Indaruwanto Eko Cahyono  
Ketua Fraksi PAN



KR-Istimewa

tah untuk memperkuat kinerja Posko PPKM mikro. Di antaranya dukungan anggaran serta tambahan personel. Dukungan anggaran tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk apresiasi petugas di posko agar kerjanya bisa lebih optimal. "Dukungan personel juga tidak kalah penting. Sehingga jika ada yang tengah memiliki kesibukan, maka bisa saling mengisi," imbuh Ndaru, sapaan akrabnya.  
Di samping itu, Ndaru juga berharap peran Sat Pol PP Kota Yogya sebagai bagian dari Satgas Penanganan Covid-19 harus ikut diperkuat. Hal ini karena pandemi sudah berlangsung lama sehingga masyarakat rentan abai dalam menerapkan protokol. Kalaupun usaha maupun pengelola wisata harus secara terus menerus diingatkan agar disiplin prokes. Begitu pula masyarakat yang tengah beraktivitas di Kota Yogya jangan sampai kendur dalam menerapkan prokes.  
"Kunci utama penegakan prokes ialah konsistensi petugas. Sat Pol PP harus bisa berada di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi. Mengingatkan jika ada warga yang kurang disiplin. Warga yang ditinggalkan pun harapannya tidak tersinggung karena ini demi kebaikan semuanya," tandas Ndaru. **(Dhi)-d**